

## THE EVOLUTION OF PAO AN TUI AND ITS ROLE AFTER THE ANTI-CHINESE RACIAL RIOTS IN TANGERANG (1946-1949)

Perkembangan Pao An Tui dan Perannya pasca-Kerusuhan Rasial Anti-Tionghoa di Tangerang (1946-1949)

Fani Oktaviani <sup>1a(\*)</sup> Ibnu Sodik <sup>2b</sup>

<sup>12</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Semarang

[afanioktavians@students.unnes.ac.id](mailto:afanioktavians@students.unnes.ac.id)

[ibnusodik@mail.unnes.ac.id](mailto:ibnusodik@mail.unnes.ac.id)

(\*) Corresponding Author

[fanioktavians@students.unnes.ac.id](mailto:fanioktavians@students.unnes.ac.id)

**How to Cite:** Fani Oktaviani. (2025). Perkembangan Pao An Tui dan Perannya dalam Kerusuhan Rasial Anti-Tionghoa Tangerang di Tangerang (1946-1949) doi: 10.36526/js.v3i2.5825

Received : 17-07-2025

Revised : 30-09-2025

Accepted: 08-10-2025

### Keywords:

Chinese,  
Social Movement,  
Racial riots,  
Evolution

### Abstract

This research aims to analyze the role of the security forces formed for the Chinese community affected by the anti-Chinese racial riots that occurred in Tangerang in 1946. Using historical research methods that consist of heuristic, source criticism, interpretation, and historiography, the data used in this research was obtained through analysis of written documents, newspapers, and secondary literature relevant to the research of the evolution of a Chinese security force who is the origins of which can be seen from the anti-Chinese racial riots that happened a year before the forces were officially formed. The findings of this research reveal that the formation of a security force for the Chinese community cannot be separated from the threat in the form of social movements carried out by militia troops due to economic factors. The novelty of this research lies in the analysis of the role of the Pao An Tui Chinese community security group in the anti-Chinese racial riots that occurred in Tangerang in 1946, as well as the evolution of the organization after it was officially formed a year after the riots occurred.

## PENDAHULUAN

Tangerang (berasal dari kata “tanger” dan “perang”) merupakan suatu daerah yang terletak di pinggiran ibukota. Kata “tanger” dalam nama Tangerang sendiri bermakna tanda, hal ini dikarenakan terdapat satu tugu di Tangerang yang menjadi tanda atau batas dari daerah kekuasaan VOC dan Kesultanan Banten. Sedangkan kata “perang” dalam nama Tangerang ini digunakan karena dulunya Tangerang kerap menjadi medan perang. Serdadu VOC yang berasal dari Madura menyebut Tangerang sebagai Tanggerang, hingga masyarakat yang bermukim di Tangerang kemudian menyebut daerahnya sebagai Tangerang.

Hadirnya masyarakat etnis Tionghoa di Tangerang ini adalah fakta sosial yang hingga saat ini mereka telah berminum di Tangerang selama ratusan tahun, dari generasi ke generasi. Walaupun masyarakat etnis Tionghoa di Tangerang mengidentifikasi mereka sebagai orang Tionghoa, namun kenyataannya mereka tidak dapat menulis dan membaca aksara Tionghoa. Bahasa yang digunakan oleh masyarakat Tionghoa di Tangerang sehari-hari bagi yang tinggal di dalam kota adalah bahasa Melayu, dan bahasa Sunda untuk masyarakat Tionghoa yang bermukim di daerah pedalaman Tangerang (Sumarda, 1985). Etnis Tionghoa di Tangerang merupakan salah satu etnis yang dominan, dan umumnya lebih dikenal dengan sebutan Tionghoa Benteng. Hal ini dikarenakan masyarakat Tionghoa dari kelas sosial bawah yang bermukim di Tangerang di sekitar luar Benteng Makassar yang dibangun pada masa kolonial Belanda di tepi sungai Cisadane, tepatnya di daerah Sewan.

Apabila ditarik ke belakang, kedatangan etnis Tionghoa sendiri tidak dapat dipisahkan dari sungai Cisadane yang pada masa kolonial menjadi jalur perdagangan dan dilalui oleh etnis Tionghoa yang berasal dari provinsi Hokkian, lalu berlabuh serta bermukim di Teluk Naga. Dalam kitab "Tina Layang Parahyang", penyebab dari kedatangan etnis Tionghoa ke Tangerang adalah karena perahu yang ditumpangi rusak dan bekal mereka yang sudah habis. Kedatangan gelombang kedua dari etnis Tionghoa ke Tangerang ini diperkirakan sekitar tahun 1740, setelah terjadi pembantaian terhadap masyarakat Tionghoa yang berlokasi di Batavia, dan memakan 10 ribu korban jiwa. Setelah kejadian tersebut, mayoritas masyarakat Tionghoa yang kemudian melarikan diri dan mengungsi ke daerah Tangerang, tepatnya di daerah Mauk, Serpong, Legok, dan kampung lainnya (Halim, 2011).

Selain sungai Cisadane, masyarakat Tionghoa Benteng sering dikaitkan dengan daerah Pasar Lama, yang terletak di Jalan Kisamaun. Seperti yang sebelumnya sudah disebutkan, masyarakat Tionghoa Benteng mulanya bermukim di daerah sekitar sungai Cisadane seperti Sewan, namun tidak hanya Sewan saja yang menjadi daerah bermukim dari masyarakat Tionghoa Benteng pada saat mereka pertama datang ke Tangerang, tetapi daerah Pasar Lama juga menjadi daerah pemukiman masyarakat Tionghoa Benteng. Sejumlah masyarakat Tionghoa dipindahkan ke daerah Pasar Baru sekitar tahun 1800, dan pada masa itu juga masyarakat Tionghoa tinggal menyebar di daerah Tangerang. Pada masa tersebut, Pasar baru merupakan suatu tempat terjadinya transaksi jual beli barang dagangan milik orang Tionghoa yang diangkut menggunakan perahu melalui sungai Cisadane. Di Pasar Baru juga masyarakat Tionghoa mendirikan klenteng yang dinamakan Klenteng Boen Tek Bio, yang mana bangunan klenteng ini juga menjadi bangunan tertua di Tangerang. Setelah membangun Boen Tek Bio pada 1684, berselang lima tahun kemudian masyarakat Tionghoa juga membangun Boen San Bio. Kedua bangunan ini menjadi saksi sejarah dari masyarakat Tionghoa yang bermukim di Tangerang sejak tiga abad lalu. Umumnya, masyarakat Tionghoa Benteng memiliki ciri fisik, yakni kulit yang berwarna coklat dan mata yang tidak terlalu sipit apabila dibandingkan dengan masyarakat Tionghoa asli. Masyarakat Tionghoa Benteng memiliki mata pencaharian sebagai petani, peternak, dan nelayan, dan hanya beberapa dari mereka yang sukses di bidang ekonomi (Halim, 2011).

Tangerang sebagai bagian dari wilayah di Pulau Jawa yang dipandang oleh Belanda sebagai tanah yang tak bertuan ini dijadikan tanah-tanah partikelir yang dibagikan oleh Belanda kepada orang-orang dianggap telah berjasa kepada mereka. Dari praktik tanah partikelir yang terjadi di Tangerang, ini memunculkan tuan tanah yang mempunyai kuasa untuk mengatur orang-orang yang berada di tanahnya, serta menganggap bahwa orang-orang tersebut merupakan penyewa dan dituntut untuk membayar sewa kepada tuan tanah dengan cara memberikan hasil tanahnya (Onghokham, 1991). Perangkat desa yang sebelumnya memiliki kekuasaan untuk mengatur daerahnya ini kehilangan pengaruhnya dan dianggap sebagai bawahan dari tuan tanah karena memiliki hak untuk mengatur tanah partikelir yang mereka miliki. Ironisnya, tuan-tuan tanah yang ada di Tangerang ini mayoritas merupakan etnis Tionghoa yang mana pula menjadi sasaran dari rasa iri dan kecewa yang muncul dari masyarakat pribumi. Hubungan baik yang terjalin antara masyarakat asing, termasuk Tionghoa, dengan Belanda ini dipandang oleh pribumi sebagai dukungan bagi Belanda, terlebih tujuan Belanda menjalin hubungan baik dengan masyarakat asing ini dengan tujuan untuk memperbesar pasarnya (Purwaningsih, 2000).

Dengan hak istimewa untuk masyarakat Tionghoa oleh Belanda ini semakin mendorong masyarakat pribumi untuk semakin membenci masyarakat Tionghoa. Terlebih pada saat Belanda dan Jepang memberikan pelatihan terhadap orang-orang Tionghoa secara militer ini membuat masyarakat pribumi mencurigai aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat Tionghoa, terlebih Tionghoa Benteng. Di masa penjajahan Jepang dibentuk pula organisasi militer yang beranggotakan masyarakat Tionghoa yang bernama Hua Chiao Tsung Hui (HCTH) dengan tujuan mempermudah pemerintah Jepang untuk melakukan pengawasan terhadap masyarakat Tionghoa (Sulardi, 2015). Selain menjadi organisasi militer, HCTH juga memiliki wewenang untuk mengumpulkan dana yang digunakan sebagai dana tambahan dalam perang. Rasa iri dan kecewa yang disebabkan oleh hal ini, serangan-serangan pun dilancarkan oleh laskar rakyat terhadap masyarakat Tionghoa yang

dianggap pro Belanda. Di Tangerang sendiri, laskar rakyat yang melakukan serangan terhadap masyarakat Tionghoa Benteng adalah Laskar Ubel-Ubel, atau biasa dikenal dengan Laskar Pasukan Berani Mati (LPBM). Serangan yang dilakukan oleh Laskar Hitam sendiri berupa penganiayaan, penculikan, perampasan harta, bahkan pembunuhan terhadap masyarakat Tionghoa Benteng. Kerusakan anti-Tionghoa yang terjadi di Tangerang memang tidak hanya sekali terjadi pada masa revolusi kemerdekaan Indonesia, memang sebelumnya pun sudah terjadi sejak lama. Namun, kerusakan yang dilakukan oleh Laskar Hitam merupakan kerusakan yang paling besar dampaknya, hingga menewaskan 600 masyarakat Tionghoa Benteng (Purcell, 1965). Hal ini membuat masyarakat Tionghoa yang ada di Tangerang ini membuat barisan keamanan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan jiwa dan harta milik masyarakat Tionghoa Benteng dengan nama Pao An Tui pun dibentuk.

Dibentuknya suatu barisan keamanan untuk masyarakat Tionghoa di masa revolusi kemerdekaan Indonesia ini seperti memunculkan setitik harapan setidaknya bagi masyarakat Tionghoa yang sebelumnya beberapa kali mendapat serangan dari laskar rakyat. Setelahnya, Pao An Tui diharapkan dapat mendedikasikan diri sebagai barisan keamanan untuk menjalankan tugasnya dalam melindungi masyarakat Tionghoa serta memberi rasa aman bagi masyarakat Tionghoa Benteng yang bermukim di Tangerang dan terdampak peristiwa kerusakan rasial anti-Tionghoa tahun 1946. Apabila pembentukan Pao An Tui tidak dilaksanakan pada masa itu, hal ini dapat menyebabkan lebih banyak korban masyarakat Tionghoa di Tangerang yang berjatuh akibat tidak adanya koordinasi terkait bala bantuan serta tempat pengungsian untuk para korban, juga kerugian dari peristiwa ini yang lebih besar pula daripada yang sebelumnya. Tidak adanya eksistensi Pao An Tui sebagai badan keamanan juga tidak menutup kemungkinan bahwa peristiwa kerusakan rasial yang serupa akan terjadi di masa depan dengan skala yang lebih besar daripada yang sebelumnya telah terjadi, hal ini dapat menumbuhkan satu lagi ancaman terhadap persatuan dan kesatuan Indonesia pada masa itu.

Perubahan fungsi dari barisan keamanan Pao An Tui dari tujuan awal dibentuknya badan tersebut memunculkan konflik baru. Pao An Tui yang semula merupakan barisan keamanan yang bertugas untuk mengkoordinir masyarakat Tionghoa Benteng dalam kerusakan rasial anti-Tionghoa serta memberikan pertolongan terhadap korban, dalam pelaksanaannya digunakan oleh pemerintah Belanda sebagai 'tentara cadangan' dalam perang pada masa revolusi kemerdekaan Indonesia. Hal ini kemudian mencerminkan adanya pergeseran fungsi dari barisan keamanan Pao An Tui yang semula dibentuk dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap rakyat Tionghoa Benteng, lambat laun berubah menjadi 'tentara tambahan' Belanda dalam perang melawan pribumi. Maka dari itu, melalui penelitian ini, penulis tertarik untuk menelaah lebih jauh mengenai bagaimana dampak dari kerusakan ini bagi masyarakat Tionghoa yang bermukim di Tangerang, lalu upaya apa yang dilakukan oleh Pao An Tui untuk para korban dari peristiwa tersebut, serta bagaimana perkembangan dari barisan keamanan Pao An Tui pada periode 1946-1949.

Dari uraian diatas, penulis terdorong untuk melakukan penelitian yang secara khusus menganalisis mengenai bagaimana suatu barisan keamanan yang awalnya terbentuk akibat gerakan sosial yang terjadi di satu daerah ini menjadi badan yang berdiri secara resmi serta perannya dalam gerakan sosial tersebut. Fokus dari pembahasan penelitian ini sendiri mengenai eksistensi barisan keamanan rakyat Tionghoa Pao An Tui pada tahun 1946-1949 serta peranannya dalam kerusakan rasial yang terjadi di Tangerang pada tahun 1946. Maka dari itu, penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, secara teoretis dan praktis, sebagai pengetahuan dan juga sumbangsi terhadap khazanah ilmu pengetahuan serta dapat menjadi referensi dalam melakukan penelitian dengan topik permasalahan yang sama. Selain itu, harapan penulis dalam melakukan penelitian ini agar dapat bermanfaat di lingkup akademis, juga menjadi media bagi masyarakat untuk mengetahui masyarakat Tionghoa di Tangerang sebagai salah satu kelompok masyarakat yang telah bermukim sejak zaman kolonial, serta sebagai motivasi bagi masyarakat untuk mengetahui sejarah lokal Kota Tangerang lebih dalam lagi.

## METODE

Dalam melakukan penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian sejarah. Definisi dari metode penelitian sejarah sendiri menurut Garraghan (1946) yakni satu kumpulan prinsip-prinsip serta aturan yang bertujuan untuk membantu penulis dalam melakukan pengumpulan sumber sejarah, kemudian menguji sumber-sumber sejarah tersebut secara kritis, hingga menyajikan hasil dari penelitian yang telah dilakukan (hasil penelitian umumnya disajikan secara tertulis).

Untuk dapat memenuhi metode penulisan sejarah, penulis harus melakukan beberapa tahapan, antara lain heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi (Kuntowijoyo, 2013) Tahapan heuristik atau pengumpulan sumber sejarah penulis lakukan dengan menggunakan sumber-sumber tertulis dan studi pustaka. Sumber sejarah tertulis yang penulis gunakan untuk penelitian ini berupa surat kabar sezaman yang relevan dengan topik penelitian yang didapat dari koleksi mikrofilm Perpustakaan Nasional RI, adapun beberapa surat kabar Belanda yang didapat melalui portal arsip resmi Delpher. Untuk melengkapi informasi yang didapat dari sumber tertulis, penulis juga melakukan studi pustaka dengan menggunakan jurnal, skripsi, dan buku-buku yang relevan dengan penelitian ini.

Dengan menggunakan metode penelitian sejarah, penelitian ini juga sejalan dengan konsep sejarah sosial dengan model evolusi seperti yang dikemukakan oleh (Kuntowijoyo, 2013), yakni sejarah yang peristiwanya berhubungan erat dengan hal-hal sosial, salah satunya adalah gerakan sosial dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian memanfaatkan teori dan atau ilmu sosial. Adapun penelitian ini menggunakan model evolusi yang bertujuan untuk menunjukkan bahwa penelitian ini menggambarkan perkembangan suatu barisan keamanan yang terbentuk pasca peristiwa gerakan sosial yang terjadi, bagaimana badan tersebut berfungsi, hingga akhirnya dibubarkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Kerusuhan Rasial Anti-Tionghoa di Tangerang 1946*

Perubahan pemangku kekuasaan di Indonesia yang semula berada di tangan Belanda lalu jatuh ke tangan Jepang pada tahun 1942 berdampak pada perubahan kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat yang bermukim di pedesaan (Purwaningsih, 2000). Salah satu perubahan yang terjadi adalah adanya pergantian strata hirarki masyarakat tertinggi yang sebelumnya kelompok priyayi adalah tingkatan terbawah dalam hirarki masyarakat pada masa penjajahan Belanda kemudian menjadi satu elemen penting pada masa kekuasaan Jepang. Pada masa pendudukan Jepang, kelompok priyayi pribumi menjadi komponen penting atas kebijakan-kebijakan yang diberlakukan oleh Jepang. Perubahan juga terjadi terhadap masyarakat Tionghoa yang sebelumnya kedudukannya lebih tinggi daripada masyarakat pribumi, kehilangan hak-hak tersebut pada masa pendudukan Jepang. Namun, di sektor ekonomi, masyarakat Tionghoa masih memiliki peran yang lebih besar daripada masyarakat pribumi (Lapian & Chaniago, 1988).

Kebijakan-kebijakan Jepang yang mengikat, ditambah dengan dominasi yang kuat dari masyarakat Tionghoa di sektor ekonomi ini membuat masyarakat yang bermukim di desa terjebak dalam kemiskinan secara terus menerus, penduduk desa yang tidak mempunyai tanah terpaksa melakukan tindakan kriminal seperti merampok agar dapat bertahan hidup (Purwaningsih, 2000). Di Tangerang, tuan tanah dari tanah partikelir mayoritas merupakan masyarakat Tionghoa, ini membuat mereka mendapatkan hak-hak istimewa, salah satunya adalah penduduk dari tanah partikelir tersebut harus membayar pajak kepada tuan tanah. Hal ini menimbulkan kekecewaan masyarakat pribumi kepada masyarakat Tionghoa (Korver, 1985), dan membuat masyarakat Tionghoa Benteng menjadi sasaran dari tindakan kriminal yang dilakukan oleh masyarakat pribumi.

Batavia yang diduduki oleh Belanda pada bulan Mei 1946 membuat rakyat dan pemuda yang tergabung dalam barisan pejuang bergerak mundur dari kota dan membangun basis di daerah luar Batavia. Barisan pejuang yang juga dikenal sebagai laskar rakyat ini memiliki persenjataan sendiri dan pertumbuhan anggotanya sangat masif pada masa itu. Senjata yang digunakan oleh

laskar rakyat dalam pergerakan bukanlah senjata kompleks seperti senjata yang dimiliki oleh TKR, senjata mereka lebih tradisional dan merupakan dari bagian kehidupan mereka sehari-hari. Dalam kerusuhan, laskar rakyat juga tidak memiliki strategi atau seragam khusus, yang mereka lakukan biasanya adalah menyerang masyarakat Tionghoa secara membabi buta (Purwaningsih, 2000). Selain itu, di sekitar Tangerang pun kerusuhan rasial yang dilakukan oleh laskar rakyat semakin meningkat. Kecurigaan laskar rakyat terhadap masyarakat Tionghoa yang bergabung dengan KNIL ini membuat mereka beranggapan bahwa masyarakat Tionghoa memihak dan membantu Belanda (Cribb, 1990).

Akibat dari rasa curiga yang tumbuh terhadap masyarakat Tionghoa, ini menyebabkan diberlakukannya aturan bahwa masyarakat Tionghoa dilarang untuk meninggalkan Tangerang, dan akan dipenjarakan apabila mereka melanggar peraturan tersebut. Tujuan dari pembatasan ruang ini juga untuk meminimalisir interaksi antara masyarakat Tionghoa dengan Belanda. Belanda yang pada saat itu merupakan pemangku kekuasaan di daerah Tangerang memiliki kewajiban untuk memulihkan gerakan sosial yang terjadi di sekitar, dan masyarakat Tionghoa yang merasa terancam bersedia untuk membantu Belanda dengan cara membantunya mencari laskar rakyat yang memicu kerusuhan ini, masyarakat Tionghoa juga memberikan informasi mengenai keberadaan laskar rakyat secara sukarela (Purwaningsih, 2000). Salah satu laskar rakyat yang terbentuk pada masa ini adalah Laskar Ubel-Ubel atau biasa juga dikenal sebagai Laskar Pasukan Berani Mati (LPBM) (Sumarda, 1985).

Laskar Ubel-Ubel dikenal juga sebagai laskar yang sering memenjarakan masyarakat Tionghoa dan pejabat pemerintah yang diduga sebagai mata-mata (Ekadjati, 2004). Pemberontakan juga terjadi dari dalam tubuh Laskar Ubel-Ubel, yang disebabkan karena salah satu anggotanya membelot dan menyebabkan kerusuhan di daerah Grendeng dengan alibi serangan ini dibawah perintah dari KH. Achmad Khaerun. Grup pembelot Laskar Ubel-Ubel ini juga sering menyerang masyarakat Tionghoa yang dapat dikatakan kaya, hingga membuat panas TKR (Sumarda, 1985). TKR Resimen 4 yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Sing kemudian mengirimkan pasukan AMT (Akademi Militer Tangerang) untuk menertibkan daerah Tangerang dari kekacauan yang disebabkan oleh Laskar Ubel-Ubel. Setelah dirasa aman dari kekacauan, beberapa anggota dari AMT kembali ke zona perang untuk menyita senjata milik Jepang di Lengkong (Saleh, 1995).

Perpindahan pemangku kekuasaan di daerah Tangerang yang jatuh kepada Belanda pada masa ini menyebabkan kekacauan dalam politik. Sebagai pemangku kekuasaan, Belanda mempunyai kewajiban untuk menertibkan kerusuhan ini. Namun, kedatangannya ke Tangerang—tepatnya ke daerah Cengkareng—ini tidak berlangsung dengan tertib hingga militer Belanda harus memukul mundur massa dengan serangan militer. Untuk membendung serangan yang dilancarkan oleh Belanda, TKR Resimen 4 yang sebelumnya ditugaskan di zona perang harus bekerja sama dengan laskar rakyat, yang mana ironisnya laskar rakyat sebelumnya yang memulai kekacauan terhadap masyarakat Tionghoa. Walaupun demikian, laskar rakyat-laskar rakyat ini tetap dipandang sebagai sesama pejuang yang memperjuangkan daerah mereka. TKR juga membagi senjata yang mereka gunakan, seperti granat, kepada laskar rakyat untuk memukul mundur militer Belanda (Purwaningsih, 2000). Perasaan sebagai warga yang dijajah menumbuhkan solidaritas antara TKR dan laskar rakyat, yang memiliki visi yang sama yaitu mengusir bangsa asing dari daerahnya, termasuk siapapun yang bersimpati kepada Belanda.

Desas desus tentang banyaknya masyarakat Tionghoa yang bergabung dengan Belanda sebagai mata-mata membakar rakyat pribumi yang tergabung dalam laskar rakyat yang bersatu dengan TKR. Dengan demikian, kerusuhan yang dilakukan oleh laskar rakyat skalanya semakin meningkat. Di sisi lain, masyarakat Tionghoa yang menjadi korban pun mencari perlindungan dengan berlindung pada Belanda yang masyarakat Tionghoa anggap sanggup untuk melindungi mereka dari segala ancaman yang dilakukan oleh rakyat pribumi. Sebagai balas dendam, anggota-anggota laskar rakyat ini melakukan tindakan kriminalitas terhadap masyarakat Tionghoa, salah satunya adalah dengan merampok toko-tokonya secara terbuka (Sin Po, 5 Juni 1946). Menurut Sumarda (1985), kerusuhan rasial anti-Tionghoa ini dimulai dengan dibakarnya rumah-rumah

masyarakat Tionghoa sebagai balas dendam karena tentara Belanda membakar pemukiman rakyat pribumi di sekitar Cisadane. Target dari laskar rakyat sendiri tidak terpaku pada masyarakat Tionghoa yang merupakan tuan tanah atau orang kaya, mereka juga menargetkan pedagang dan petani.

Dalam waktu dua hari, jumlah kerusakan yang terjadi meningkat drastis, bahkan anggota laskar rakyat juga menggunakan senjata yang berbahaya, seperti senapan api dan pistol (Eng, 1946). Seluruh laporan mengenai daerah-daerah yang terdampak, jumlah korban yang kehilangan nyawa, hingga informasi mengenai orang hilang secara rinci dalam buku yang diterbitkan oleh Chung Hua Tsung Hui setahun setelah kerusakan rasial anti-Tionghoa ini terjadi. Dalam buku tersebut juga disebutkan bahwa sebanyak 25,000 orang berhasil mengungsikan diri ke daerah Batavia, 1,269 pemukiman masyarakat Tionghoa dibakar hingga rata dengan tanah, dan 238 lainnya rusak akibat kerusakan (Chung Hua Tsung Hui, 1947). Laporan tentang banyaknya korban juga disebutkan dalam pernyataan Soember Penerangan, dimana korban dari kerusakan rasial anti-Tionghoa berjumlah 366 orang, 169 orang hilang, dan 3,136 orang berhasil kabur ke daerah Batavia (Lie, 2014).

### ***Eksistensi Pao An Tui sebagai Badan Keamanan Tionghoa***

Trauma atas terjadinya kerusakan rasial anti-Tionghoa yang terjadi di Tangerang pada tahun 1946 dan kerusakan-kerusakan lainnya di daerah membuat organisasi Tionghoa yang bergerak di bidang sosial ekonomi, Chung Hua Tsung Hui (CHTH) berinisiatif untuk menggelar konferensi yang bertujuan untuk bersama-sama mencari jalan keluar dalam menghadapi situasi mencekam yang terjadi. Konferensi yang diselenggarakan selama tiga hari di gedung Sing Ming Hui membuahkan persetujuan atas pembentukan badan keamanan yang dikenal dengan Pao An Tui, yang bertugas melindungi dan menjaga keamanan masyarakat Tionghoa, termasuk harta benda yang dimilikinya (Sulardi, 2015).

Dalam rapat terpisah yang dilakukan oleh CHTH Lien Ho Pan She Tsu, menghasilkan putusan bahwa markas besar dari Pao An Tui akan terletak di Batavia, karena yang terdampak kerusakan rasial anti-Tionghoa setahun sebelumnya mayoritas merupakan masyarakat Tionghoa yang bermukim di daerah sekitar Batavia, terlebih pada masa revolusi Batavia merupakan pusat pemerintahan Republik Indonesia. Badan keamanan Pao An Tui hadir di daerah-daerah dengan populasi masyarakat Tionghoa yang masif, sedangkan daerah-daerah yang tidak banyak masyarakat Tionghoa-nya seperti wilayah timur Indonesia pada saat itu tidak dibentuk Pao An Tui di daerah (Star Weekly, 1947). Pembentukan Pao An Tui juga disahkan oleh pemerintah Belanda pada 6 September 1947 dalam Keputusan Peraturan Penguasa Militer No. 516. Selain itu, dalam keputusan tersebut juga disebutkan bahwa keanggotaan Pao An Tui terbatas hanya untuk masyarakat Tionghoa.

Adapun tugas-tugas Pao An Tui yang diatur dalam keputusan pemerintah Belanda, yaitu Pao An Tui memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan tempat-tempat seperti pabrik, perusahaan, gudang, dan pemukiman masyarakat Tionghoa. Tidak hanya itu, mereka juga berkewajiban untuk melindungi harta benda yang dimiliki masyarakat Tionghoa, dan tidak memiliki kewajiban serta tidak diizinkan untuk terjun dalam urusan militer (Min Pao, 1947). Pao An Tui diberikan kebebasan untuk membentuk organisasi cabang di daerah-daerah, dengan catatan markas pusatnya berkedudukan di Batavia. Komite pusat harus mengkoordinasikan organisasi mereka sebagai satu kesatuan, dan mempersiapkan pemuda-pemuda Tionghoa sebagai calon kader yang nantinya akan dikirim ke Batavia untuk mengikuti pelatihan militer.

Dari kewajiban yang mengharuskan komite pusat untuk mempersiapkan pemuda Tionghoa sebagai calon kader yang akan dikirim untuk mengikuti pelatihan militer, dapat disimpulkan bahwa Pao An Tui bergerak sebagai organisasi semi-militer yang berpotensi untuk terjun ke lapangan apabila terjadi kerusakan. Jika dibandingkan dengan masyarakat etnis Arab, etnis Tionghoa lebih mudah mendapatkan izin dari pemerintah Belanda. Dalam struktur badan Pao An Tui sendiri, mayoritas merupakan orang-orang Tionghoa yang sebelumnya merupakan anggota dari Chung Hua

Hui (CHH) yang dikenal sebagai organisasi yang pro-Belanda. Dominasi ini juga dianggap sebagai indikasi bahwa pemerintah Belanda menganggap etnis Tionghoa sebagai anak emas dibandingkan etnis-etnis lainnya (Sulardi, 2015). Untuk menjaga hubungan kerja sama dengan Pao An Tui, pemerintah Belanda kemudian menunjuk Tan Gwang Djiang yang merupakan anggota KNIL dari etnis Tionghoa dengan pangkat perwira sebagai perwira penghubung antara pemerintah Belanda dengan Pao An Tui.

Sejak ditunjuknya perwira KNIL sebagai perwira penghubung antara Pao An Tui dengan pemerintah Belanda, arah jalannya organisasi ini sedikit demi sedikit bergeser ke arah militer. Hal ini dikarenakan permintaan dari ketua dari Pao An Tui untuk pemerintah Belanda memfasilitasi anggota Pao An Tui dengan persenjataan dengan alasan tugas dari Pao An Tui lebih dari polisi (AS deel I, 1948). Namun, hal tersebut ditolak oleh pemerintah Belanda karena hal tersebut dapat menjadi bumerang di masa depan. Dalam menjalankan tugasnya, anggota Pao An Tui juga kerap berpartisipasi dalam operasi militer yang dilakukan oleh militer Belanda, dan mereka tidak hanya berpartisipasi di pulau Jawa melainkan hingga ke pulau Sumatera (Kahin, 1990). Operasi keamanan yang dilakukan ini membuat anggota Pao An Tui sering dihadapkan dengan kelompok masyarakat yang melakukan unjuk rasa di daerah-daerah.

Pada awal pembentukannya, banyak pemuda Tionghoa yang tertarik untuk mendaftar sebagai anggota Pao An Tui karena tugasnya yang mulia, yaitu sebagai badan keamanan masyarakat Tionghoa. Tetapi, dua tahun setelah organisasi ini dibentuk, terlihat pergeseran fungsi yang sebelumnya berkewajiban untuk melakukan penjagaan keamanan serta melindungi daerah-daerah pemukiman masyarakat Tionghoa serta harta benda mereka, kemudian berganti menjadi melakukan patroli keamanan di daerah-daerah kekuasaan Belanda dengan militer Belanda. Karena popularitasnya yang merosot, Pao An Tui juga kehilangan donatur-donaturannya sehingga pada akhirnya menghadapi krisis keuangan. Di sisi lain, anggota-anggota Pao An Tui tidak segan-segan untuk memperlakukan penduduk sipil menggunakan kekerasan. Mereka juga tidak takut untuk melakukan hal yang dulu dilakukan oleh rakyat pribumi kepada masyarakat Tionghoa, mereka merusak toko-toko milik rakyat pribumi, membakarnya, bahkan melakukan pembunuhan terhadap rakyat pribumi (Sulardi, 2015). Akibatnya masyarakat Tionghoa yang bermukim di daerah tersebut meminta kepada pemerintah Belanda untuk membubarkan Pao An Tui.

Di mata masyarakat, yang dilakukan oleh Pao An Tui sudah jelas dianggap sebagai organisasi yang pro-Belanda yang mana tidak sesuai dengan perjuangan yang dilakukan untuk memerdekakan Indonesia, dan semena-mena terhadap masyarakat pribumi. Dari sisi ekonomi, pembubaran ini meninggalkan tebusan yang jumlahnya tidak sepadan dibandingkan dengan bagaimana mereka mengabdikan pada masyarakat. Dari sisi sosial, pembubaran organisasi ini membawa luka terhadap masyarakat Tionghoa, yang membuat mereka selalu dipandang sebagai kelompok etnis yang kontra terhadap Republik Indonesia.

### **Peran Pao An Tui pasca-Kerusuhan Rasial Anti-Tionghoa di Tangerang 1946**

Secara *de facto*, Pao An Tui terbentuk setahun setelah kerusuhan rasial anti-Tionghoa yang terjadi di Tangerang pada 1946. Namun, pembentukannya secara tidak resmi dan dalam skala kecil dilakukan pada awal bulan Juni 1946, saat terjadinya kerusuhan. Organisasi masyarakat Tionghoa yang bergerak dalam bidang sosial ekonomi, Chung Hua Tsung Hui, secara kolektif membentuk komunitas kecil yang bertugas untuk menjaga keamanan dari masyarakat Tionghoa di tengah meledaknya kerusuhan rasial anti-Tionghoa di Tangerang, yang dikenal sebagai Barisan Keamanan Tionghoa (kemudian berevolusi menjadi Pao An Tui). Pembentukan barisan keamanan yang menyokong korban kerusuhan di Tangerang juga disinggung dalam rapat umum yang dilakukan di Malang pada pertengahan bulan Juni 1946 yang dipimpin oleh Mr. Oei Yong Tjoe sebagai salah satu tokoh masyarakat di Malang (Lasjkar, 1946).

Dalam bertugas, barisan keamanan ini dikoordinir oleh Chung Hua Tsung Hui sebagai organisasi masyarakat Tionghoa yang lebih besar, dan saat turun ke lapangan pun anggotanya bergerak beriringan dengan CHTH (Sin Po, 1946). Karena tujuan utama dari pembentukan

komunitas barisan keamanan ini adalah untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat Tionghoa yang terdampak kerusuhan dan berpotensi atas ancaman serangan yang dilakukan oleh laskar rakyat, barisan keamanan Pao An Tui tidak terlalu menonjol sisi militerismenya pada masa ini, berbeda dengan Pao An Tui yang dibentuk secara resmi pada 1947 karena mendapat sokongan persenjataan dari Belanda. Meskipun turun beriringan saat melakukan penyelamatan korban kerusuhan, terdapat perbedaan peran utama antara Chung Hua Tsung Hui dengan barisan keamanan Pao An Tui. Sebagai organisasi masyarakat Tionghoa dengan jaringan yang lebih luas (Sulardi, 2015), CHTH berperan dalam mengkoordinir bantuan berupa kebutuhan logistik dalam bentuk obat-obatan, pakaian, atau beras, yang merupakan persediaan milik organisasi mereka atau diberikan melalui penggalangan dana untuk korban kerusuhan. Informasi lebih lanjut mengenai penggalangan dana dan bantuan logistik ini juga disebarluaskan melalui surat kabar Sin Po dalam kolom yang berjudul "Fonds Tangerang" (Sin Po, 1946).

Sebagai unit keamanan yang lebih kecil daripada CHTH, peran dari barisan keamanan Pao An Tui dalam kerusuhan rasial anti-Tionghoa di Tangerang pada 1946 yang utama adalah sebagai pelaksana lapangan dan keamanan masyarakat Tionghoa. Dalam melakukan tugasnya, barisan keamanan Pao An Tui mengevakuasi masyarakat Tionghoa yang bermukim di daerah pinggir kota ke pusat kota. Melalui laporan yang ditulis oleh Chung Hua Tsung Hui (1947), disebutkan juga bahwa dibentuknya barisan keamanan swadaya (yang merupakan cikal bakal dari Pao An Tui) bertujuan untuk membantu dalam proses evakuasi korban kerusuhan yang berlokasi di Balatsjs dan Cikupa ke daerah Batavia, dan proses evakuasi ini dikoordinir oleh CHTH. Umumnya, masyarakat Tionghoa dan korban dari kerusuhan dievakuasi ke daerah yang lebih aman atau tidak termasuk dalam zona perang, seperti Batavia. Barisan keamanan Pao An Tui turut mengawal proses evakuasi ini dan membersamai korban kerusuhan hingga ke tempat pengungsian. Tidak hanya itu, di tempat pengungsian, barisan keamanan Pao An Tui juga berperan sebagai koordinator perlindungan keamanan masyarakat Tionghoa.

Dalam membagikan bantuan terhadap korban dari kerusuhan yang sebelumnya didapat dari penggalangan dana yang dikelola oleh CHTH, barisan keamanan Pao An Tui menjadi petugas yang bertanggung jawab di tempat pengungsian. Lebih lanjut mengenai pembagian logistik ini bisa didapatkan oleh korban dengan cara membuat karcis kuning yang nantinya dapat ditukarkan dengan bantuan logistik dengan syarat masyarakat Tionghoa yang baru mendaftar karcis kuning diminta untuk membawa surat beras, atau keterangan dari *wijkmeester* (seperti pemimpin di daerah tersebut) bahwa mereka sudah tidak memiliki beras (Sin Po, 1946). Selain itu, Pao An Tui sebagai barisan keamanan serta panitia lapangan masyarakat Tionghoa juga bekerja sama dengan panitia penolong korban Tangerang untuk memindahkan 10,000 masyarakat Tionghoa via Mauk ke daerah Batavia atau kota Tangerang. Dari kerjasama ini, panitia menyediakan gedung-gedung dan sekolah yang berlokasi di wilayah Tangerang dan Batavia sebagai tempat mengungsi korban kerusuhan, dilengkapi pula dengan persediaan bahan makanan yang ditanggung oleh pemerintah Republik (Merdeka, 1946).

## PENUTUP

Sebagai suatu organisasi semi-militer, pembentukan Pao An Tui berakar dari barisan keamanan Tionghoa yang dibentuk oleh Chung Hua Tsung Hui (CHTH) akibat peristiwa kerusuhan rasial anti-Tionghoa yang terjadi di Tangerang pada tahun 1946 yang bertugas sebagai panitia penolong di lapangan dan menjaga keamanan masyarakat Tionghoa. Dalam menjalankan tugasnya sebagai panitia lapangan saat kerusuhan terjadi, barisan keamanan Pao An Tui turun ke lapangan beriringan dengan Chung Hua Tsung Hui sebagai koordinator lapangan dan organisasi pusat, untuk mengevakuasi korban yang bermukim di pinggiran kota ke tempat yang lebih aman, hingga membantu mendistribusikan bantuan logistik yang dikelola oleh CHTH kepada para pengungsi di kamp pengungsian. Namun, pendirian Pao An Tui sebagai barisan keamanan Tionghoa ini dipertanyakan kala komando organisasi jatuh kepada perwira KNIL yang menegaskan bahwa peran dari Pao An Tui adalah sebagai tentara tambahan bagi militer Belanda. Setelahnya, intensitas Pao

An Tui berpartisipasi dalam operasi militer Belanda untuk merebut kembali daerah-daerah kekuasaannya meningkat. Dengan demikian, masyarakat memandang Pao An Tui sebagai simpatisan Belanda dan kehilangan kepercayaan sepenuhnya, sehingga Pao An Tui dibubarkan pada tahun 1949 akibat kehilangan kepercayaan masyarakat dan menurunnya donatur yang menyokong dana kegiatan operasional Pao An Tui.

#### DAFTAR PUSTAKA

- AS deel I. (1948). "Verhoek van den heer Kan om steunverlening aan Pao An Tui"
- Chung Hua Tsung Hui. (1947). *Memorandum Outlining Acts of Violence and Inhumanity Perpetrated by Indonesian Bands on Innocent Chinese Before and After the Dutch Police Action was Enforced on July 21, 1947*. Chung Hua Tsung Hui Batavia.
- Cribb, R. B. (1990). *Gejolak Revolusi di Jakarta 1945-1949 Pergulatan Antara Otonomi dan Hegemoni*. Grafiti.
- Ekadjati, E. S. (2004). *Sejarah Kabupaten Tangerang*. Pemerintah Kabupaten Tangerang.
- Eng, T. B. (1946). *Surat Komite Tionghoa Pembantoe Keamanan Oemoem Djakarta, 6 Juni 1946*.
- Garraghan, G. J. (1946). *A Guide to Historical Method*. Fordham University Press.
- Halim, W. (2011). *Ziarah Budaya Kota Tangerang Menuju Masyarakat Berakhlakul Karimah*.
- Kahin, A. R. (1990). *Pergolakan Daerah Pada Awal Kemerdekaan*. Pustaka Utama Grafiti.
- Korver, A. P. E. (1985). *Sarekat Islam Gerakan Ratu Adil?* Grafitipress.
- Kuntowijoyo. (2013). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Tiara Wacana.
- Lapian, A. B., & Chaniago, J. R. (1988). *Dibawah Pendudukan Jepang: Kenangan 40 Orang yang Mengalaminya*. ANRI.
- Lasjkar. (1946, June 21). *Tiap orang Tionghoa hendaknya djadi Patriot Indonesia*.
- Lie, R. (2014). *Social Revolution and the Massacre of Chinese in Tangerang, 1945-1946*. Universiteit Leiden.
- Merdeka. (1946, June 22). *Sekitar Pengoengsi Rajat Tionghoa*.
- Onghokham. (1991). *Rakyat dan Negara*. Pustaka Sinar Harapan.
- Purcell, V. (1965). *The Chinese in Southeast Asia* (Second Edi).
- Purwaningsih, S. M. (2000). *Kerusuhan Anti-Cina: Tangerang 1913-1946*. Universitas Indonesia.
- Saleh, R. H. A. (1995). *Akademi Militer Tangerang dan Peristiwa Lengkong*. Yayasan Pustaka Utama.
- Star Weekly. (1947, August 24). *Sekiter Pao An Tui*.
- Sulardi. (2015). *Pao An Tui 1947-1949*. Masup Jakarta.
- Sumarda, H. (1985). *Tangerang 1945-46, Pemerintah dan Rakyat* [University of Indonesia]. <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20157062&lokasi=lokal>
- Sin Po. (1946, June 4). *Warta dari "Chiu Chi Ku."*
- Sin Po. (1946, June 5). *Noraka Sapoeter Tangerang*.
- Sin Po. (1946, June 6). *Fonds Tangerang*.
- Sin Po. (1946, June 8). *Warta dari "Chiu Chi Ku."*